



## KMS perlu evaluasi

Rina Wijayanti  
HARIAN JOGJA

**JOGJA**—Pemerintah Kota menilai perlu dilakukan evaluasi terkait layanan Kartu Menuju Sehat (KMS).

Evaluasi penggunaan KMS ini dirasa perlu dilakukan untuk menyesuaikan perubahan kondisi kesejahteraan penggunanya. Camat Gedongtengen Nurhidayat menjelaskan saat ini di kecamatannya tengah melakukan proses evaluasi pengentasan warga miskin melalui program KMS. Kendati demikian soal seberapa besar pengaruhnya pada masyarakatnya Nurhidayat mengaku masih dalam penggodokan tim. "Evaluasi KMS itu memang ada dan perlu, saat ini Kecamatan Gedongtengen sedang melakukannya, perubahannya ya belum tahu," katanya kepada *Harian Jogja*, Sabtu (18/6).

Nurhidayat menjelaskan dari evaluasi yang dilakukan diharapkan KMS dapat tepat menyasar pada kalangan warga yang membutuhkan. Untuk evaluasi tersebut, dijelaskannya, diperkirakan akan selesai sekitar Oktober mendatang. "KMS memang selalu butuh evaluasi untuk kembali melakukan *updating* data warga miskin, sehingga KMS tepat pada sasaran. Mungkin tempat kami akan selesai pada Oktober nanti," tandasnya.

Saat dikonfirmasi perlu tidaknya evaluasi pelaksanaan KMS, Wakil Walikota Jogja Haryadi Suyuti menjelaskan KMS sangat perlu dilakukan evaluasi. Saat dievaluasi mengenai akses fasilitasnya, baik pendidikan, kesehatan dan layanan lainnya. Mengenai layanan dijelaskan Haryadi saat ini masih butuh perbaikan dengan melakukan evaluasi secara dinamis. Dia menyebut layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan serta manfaat

dan ketepatan sasarnya harus perlu dievaluasi. "Evaluasi KMS memang harus dilakukan dari waktu ke waktu, baik mengenai manfaatnya dan ketepatan sasarnya. Kenyataan yang kami lihat saat ini warga miskin di Jogja kan masih ada, fasilitasnya adalah KMS. Nah aksesnya yang perlu kami perbaiki terus sesuai dinamika yang berkembang" katanya.

Kepada *Harian Jogja* dia mengaku prihatin sikap sejumlah warga miskin yang mengurus KMS-nya saat membutuhkan saja. Bahkan, Haryadi menampik keras anggapan warga yang menyebutkan KMS-nya dicabut. Dalam KMS dijelaskannya bukan pencabutan, melainkan kriteria pemegang KMS. Jika dalam pemegang KMS dinilai sesuai sejumlah parameter tidak masuk dalam kriteria warga miskin, seharusnya statusnya berubah.

"Yang benar jika warga sudah tidak memenuhi kriteria sebagai pemegang KMS maka akan diubah statusnya, bukan lagi warga miskin sehingga haknya sebagai pemegang KMS seharusnya tidak ada lagi," ujarnya.

**PARAMETER PENDATAAN keluarga miskin Kota Jogja**

**Pendapatan dan aset**

- Suami atau istri tidak bekerja
- Pendapatan rata-rata anggota keluarga setiap bulan kurang dari Rp200.000
- Status kepemilikan bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri/kontrak/sewa ngindung
- Keluarga tidak memiliki barang selain tanah yang bernilai lebih dari Rp1 juta
- Daya listrik maksimal 450 watt dan tagihan listrik per bulan kurang dari Rp50.000.

**Papan**

- Lusa tempat tinggal rata-rata tiap anggota keluarga kurang dari 5 meter persegi
- Jenis bahan bidang dinding terluas dari tempat tinggal berupa bambu/kayu/bahan lain berkualitas rendah/tembok tanpa dipleset atau dipleset kualitas rendah

**Pangan**

- Keluarga tidak mampu memberi makan anggota keluarga 3x setiap hari
- Keluarga tidak mampu membeli dan menyediakan lauk daging/telur/ayam/kan/susu 2x seminggu

**Sandang**

- Keluarga hanya dapat membelikan pakaian baru anggota keluarga maksimal satu kali setahun

**Kesehatan**

- Keluarga tidak mampu membayar biaya tindakan Puskesmas
- Sumber air minum dan masak bukan dari PAM
- Tempat membuang air besar tidak di MCK

**Pendidikan**

- Pendidikan Kepala Keluarga Maksimal Lulus SMP
- Keluarga memiliki anak atau anggota keluarga yang sedang sekolah sampai dengan tingkat SMK/SMA. \*satu anak atau anggota keluarga \*dua anak atau anggota keluarga \*mendapat anak atau sekolah yang D/D tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan sampai dengan SMA/SMK

**Sosial**

- keluarga tidak mengikuti aktivitas kegiatan lingkungan sama sekali

SUMBER: PEMKOT JOGJA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005